

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan daerah, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek penting untuk diteliti dengan menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan dengan membuktikan bahwa dana yang telah digunakan sudah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan menjadi aspek yang krusial dalam pemerintahan yang berfungsi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjadi aspek terpenting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu pemerintahan. Peran pemerintah dalam sangat penting bagi masyarakat, sehingga dituntut mampu melaksanakan semua tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi tersebut sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Novatiani et al., 2019).

Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Isu mengenai kinerja pemerintah daerah yang belum menunjukkan hasil yang positif bagi masyarakat, masalah ini menjadi perhatian publik. Rakyat menuntut pemerintah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Selain itu, pemerintah harus mengambil berbagai tindakan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tata kelola keuangan yang sangat baik pada pemerintahan. Pemerintah daerah juga dapat memastikan bahwa proses kinerja mereka memenuhi harapan publik untuk penggunaan dana daerah yang bertanggung jawab dan sejalan dengan tujuan pembangunan seiring dengan meningkatnya tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas (Karina et al., 2023).

Perekonomian di Kabupaten Sampang pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,71%, di mana pertumbuhan tertinggi didapat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga dan non profit yang melayani rumah tangga . Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sampang menjadi lebih baik. Selain itu, juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan di Kabupaten Sampang yang dapat mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tantangan dan upaya dalam perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada 5 tahun terakhir ini, Kabupaten Sampang berhasil meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK, 2021). Hal ini dapat menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan menyesuaikan peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah baru, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang ada. Proses penyusunan peraturan daerah yang baru ini juga melibatkan berbagai pihak,

termasuk DPRD dan instansi terkait untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pada tahun 2023 Bupati Sampang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan praktik akuntansi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Junaidi, 2023). Namun, pada tahun 2024 lalu, yaitu terdapat 128 desa yang memiliki BUMDes, tetapi hanya 4 desa yang telah menyusun laporan keuangan (BPKP, 2024). Hal tersebut menunjukkan terdapat lembaga BUMDes yang masih banyak belum sesuai dengan standar akuntansi yang diharapkan. Secara keseluruhan, Kabupaten Sampang menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun juga terdapat berbagai tantangan. Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terus dilakukan untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut Elkha & Wahidawati (2020) yang diambil dari penelitian Mardiasmo (2006:3) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah tentang penggunaan media pertanggungjawaban secara periodik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan ditingkatnya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan tata pemerintahan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, akuntabilitas tidak saja terkait proses, kinerja, dan manajemen, namun juga terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas yang dilakukan penyedia penyelenggara dalam mengatur kegiatan masyarakat memiliki kewajiban dalam menentukan hasil kinerja dan tanggung jawab serta mengatur langkah-langkah membuat keputusan yang sesuai bagi kesejahteraan masyarakat. (Mandasari et al., 2024).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya (Novatiani et al., 2019). Dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat. Pengaturan tata kelola pemerintahan yang lebih baik pada pengelolaan keuangan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi merupakan kewajiban pemerintahan yang harus dipenuhi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, otomatisasi, pemantauan dalam waktu nyata, dan pelaporan yang lebih efisien dapat dicapai. Namun, ini juga membawa tantangan baru untuk mengelola risiko siber dan menjaga keamanan data. Akibat perubahan regulasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri dengan standar akuntansi yang rumit dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang terus berubah (Karina et al., 2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggap dapat membuka jalan bagi pemerintah daerah menuju era transaksi digital di sistem birokrasi. Saat ini, pemerintah juga dihadapkan pada tekanan untuk segera beradaptasi dengan kemajuan modern,

sehingga pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah (Maulani et al., 2024).

Digitalisasi informasi adalah proses mengubah berbagai jenis informasi dari format analog ke format digital yang membuat informasi lebih mudah untuk dibuat, disimpan, dikelola, dan didistribusikan kembali kepada orang-orang untuk berbagai keperluan dan dasar pengambilan keputusan (Maryanto et al., 2022). Transformasi digital ini, diterapkan pada pemerintahan daerah dalam bentuk *e-government*. Struktur *e-government* terdiri dari kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumber daya manusia (HR), dan peraturan di tingkat lembaga yang berkaitan dengan pengembangan *e-government*. Oleh karena itu, kinerja dan keterampilan karyawan dalam era transformasi digital sangatlah penting untuk menunjang kinerja suatu perusahaan. Pada transformasi digital dalam panduan sistem manajemen dokumen elektronik, akan dapat menemukan lebih banyak tentang infrastruktur informasi, termasuk format, struktur, dan metode berbagi data (Eka Patrisia et al., 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil transformasi digital sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah transformasi digital ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak langsung menjadi variabel utama yang dianalisis, melainkan bertindak sebagai faktor yang dapat memperbesar, memperkecil, atau mengubah kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel lain. Teknologi digital dapat mempengaruhi kinerja pada pemerintahan dalam mengetahui seberapa besar atau seberapa efektif pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Jika pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah telah mengadopsi teknologi digital yang

canggih, maka pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kinerja pemerintahan daerah bisa lebih besar karena adanya efisiensi dan kemudahan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, transformasi digital sebagai variabel moderasi memperlihatkan bagaimana penerapan teknologi dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam beberapa penelitian, seperti penelitian Mandasari et al., (2024) kinerja pemerintah daerah dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara parsial karena kontribusi yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi atau lembaga. Hal ini sejalan dengan penelitian Novatiani et al. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian Binawati & Badriyah (2022) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah, tetapi pengelolaan keuangan dalam akuntabilitas dan transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan di daerah kabupaten Magelang, namun secara simultan berpengaruh signifikan semua. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak secara langsung mempengaruhi kualitas pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena sebagai bagian dari sektor publik, transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu keharusan, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya public secara terbuka serta menyediakan informasi yang mudah diakses bagi Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah transformasi digital dapat memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah transformasi digital dapat memoderasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dalam memoderasi transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dalam memoderasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan, dan memperluas wawasan keilmuan bagi para mahasiswa dan akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu terkait dengan permasalahan dalam mengelola keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka sehingga mampu memberi sumbangsih bagi generasi maupun para pemimpin yang bersinggungan langsung dengan Pemerintahan Daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk langkah/strategi perbaikan berkelanjutan pengelolaan keuangan daerah secara lebih terbuka dengan menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.